













pesantren dengan meninggalkan sistem pendidikan tradisional yang hanya mengkhususkan pelajaran agama.

Pada tahun 1937, KH. Abdul Halim juga terpilih sebagai anggota pengurus Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Namun organisasi-organisasi yang bergabung dalam MIAI (Persyarikatan Oelama, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, *Al-Ittihadiyatul Islamiyah*, dan organisasi Islam lainnya) yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan pendidikan, pada jaman Jepang terpaksa menghentikan kegiatannya, karena semua partai politik dan perkumpulan sosial harus dibubarkan dan Jepang tidak mengizinkan adanya perkembangan demokrasi.<sup>14</sup> Namun tidak berapa lama organisasi-organisasi tersebut diizinkan oleh Jepang untuk melakukan kegiatannya kembali. Ketika MIAI pada tahun 1943 diubah menjadi Masyumi, KH. Abdul Halim tetap duduk dalam kepengurusannya.<sup>15</sup>

Dan pada saat itulah tanggal 1 Februari 1944 Persyarikatan Oelama berganti nama menjadi Perikatan Oemat Islam, dengan perubahan Ejaan Bahasa Indonesia sistem Soewandi (1947), nama itu menjadi Perikatan Umat Islam (PUI). Adapun juga organisasi yang didirikan pada tahun 1931 oleh KH. Ahmad Sanusi di Sukabumi bernama *Al-Ittihadiyatul Islamiyah* (AII) yang berganti nama menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII).<sup>16</sup> Organisasi tersebut merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial pendidikan, sehingga menurut Mr. Syamsudin bahwa kedua organisasi tersebut memiliki visi dan misi yang sama

---

<sup>14</sup> Suharya Wanta, *KH. Abdul Halim Iskandar dan Pergerakannya* (Majalengka: Pengurus Besar PUI, 1991), 22.

<sup>15</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan KH. Abdul Halim* (Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008), 104.

<sup>16</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Press, 1987), 23.

yaitu mempersatukan umat Islam Indonesia untuk masa depan namun berdiri dalam wadah organisasi yang berbeda. Mr. Syamsudin menyatukan kedua organisasi tersebut dalam suatu pertemuan. Pertemuan pertama pada bulan Agustus 1951 dan pertemuan kedua pada bulan November 1951. Kemudian pada 5 April 1952 secara resmi kedua organisasi tersebut menjadi satu dengan nama Persatuan Umat Islam (PUI) di Bandung untuk menindaklanjuti cita-cita yang dirilis oleh KH. Abdul Halim dan KH. Ahmad Sanusi juga Mr. Syamsudin.<sup>17</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, KH. Abdul Halim diangkat sebagai anggota *Giinchoo Sangi in* di Jakarta dan kemudian diangkat sebagai anggota *Dokuritsu Zyunbi Choosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Setelah Proklamasi Kemerdekaan, KH. Abdul Halim diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai parlemen dan menjadi pelopor berdirinya Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pada tahun 1951, KH. Abdul Halim terpilih menjadi anggota DPRD 1 Jawa Barat.

Pada tahun 1956 pemilihan Konstituante, KH. Abdul Halim terpilih sebagai anggota Fraksi Partai Masyumi. Sebelum itu, tepatnya pada tahun 1940, beliau bersama KH. A. Ambari menghadap *Adviseur Voor Indische Zaken*, Dr. GF. Fijper di Jakarta untuk mengajukan beberapa tuntutan yang menyangkut kepentingan umat Islam. Ketika agresi militer Belanda, beliau juga menentang keras berdirinya Negara Pasundan yang didirikan pada tahun 1948 oleh Belanda.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Neni Abdul Halim, *Wawancara*, Majalengka, 10 Desember 2015. Neni merupakan seorang puteri dari Aziz Halim yang merupakan putera keempat dari KH. Abdul Halim.

<sup>18</sup> Mastuki at el, *Intelektualisme Pesantren Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 185.

















